

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena rahmatNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak Tahun 2016 dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

Keberadaan LAKIP saat ini dan kedepan semakin penting, baik dalam rangka penyusunan perencanaan maupun dalam melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan SKPD Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak.

Disadari bahwa LAKIP Tahun 2016 ini masih jauh dari kesempurnaan baik kuantitas maupun kualitas data yang disajikan, untuk itu masukan dan koreksi dari semua pihak sangat diharapkan.

Penyusunan LAKIP ini melibatkan banyak pihak untuk itu atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO  
KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN SIAK



**Ir. H. BUDIMAN SHAFARI, M. Kes**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620331 198903 1 002

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak Tahun 2016 merupakan LAKIP tahun kelima dalam rentang waktu implementasi Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun 2011-2016. LAKIP ini merupakan media pertanggung jawaban dan amanah yang telah ditetapkan dalam visi dan misi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak.

Dalam tahun 2016 Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak telah menetapkan beberapa sasaran strategis yang ingin dicapai guna merealisasikan tujuannya, dengan memanfaatkan anggaran pembangunan yang terealisasi dalam satu program dan anggaran dalam APBD tahun 2016.

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak tahun 2016 tidak lepas dari adanya dukungan dana yang telah dialokasikan dalam APBD tahun 2016. Adapun jumlah anggaran keseluruhan pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak tahun 2016 sebesar Rp. 8.223.540.645,- ( ***Delapan milyar dua ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat puluh ribu enam ratus empat puluh lima rupiah*** ) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja tidak langsung : Rp. 4.818.124.442,-
2. Anggaran belanja langsung : Rp. 3.405.416.203,-

Hasil capaian kinerja tahun 2016 menunjukkan bahwa pada umumnya target – target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja kegiatan maupun indikator kinerja sasaran berhasil direalisasikan walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena permasalahan waktu.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	1
Ringkasan eksekutif .....	2
Daftar Isi.....	3
Daftar Lampiran.....	4
Bab I . Pendahuluan .....	5
1. Gambaran Umum .....	5
2. Maksud dan Tujuan .....	8
3. Sistematika LAKIP 2016.....	11
Bab II . Rencana Strategis .....	13
1. Rencana Strategis .....	13
2. Rencana Kinerja Tahun 2016.....	18
Bab III. Akuntabilitas Kinerja .....	22
1. Pengukuran Kinerja .....	22
2. Evaluasi dan Analsis Akuntabilitas Kinerja.....	24
3. Analisis Pencapaian Kinerja Keuangan .....	29
Bab IV. Penutup .....	30

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan ( PKK )

Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran ( PPS )

# 1

## PENDAHULUAN

### 1. GAMBARAN UMUM

---

#### a. Kondisi Umum

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak Adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pembangunan Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM, yang mampu meningkatkan kehidupan masyarakat koperasi dan UKM, guna mewujudkan Pedagang, IKM, Koperasi, Perusahaan dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri dan profesional dibidang agrobisnis, agroindustri dan agrowisata yang padat karya serta dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Siak.

Pembangunan bidang usaha koperasi khususnya memiliki peran penting dalam pembangunan usaha koperasi pertanian, non pertanian dan USP/KSP untuk menciptakan kehidupan ekonomi masyarakat yang mapan. Pembangunan di Bidang Perdagangan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan dapat meningkatkan pengendalian dan pengawasan arus masuk barang dan jasa sehingga harga barang dan jasa akan menjadi stabil dan terkendali serta Bidang Perindustrian dapat meningkatkan dan mengembangkan Kualitas sumber daya manusia Industri melalui pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan mengadakan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pengembangan industri.

Sejalan dengan tuntunan Otonomi Daerah sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 TAHUN 1999 tentang Otonomi Daerah , kebijakan pembangunan di bidang Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM di Kabupaten Siak mengacu kepada Visi Kabupaten Siak Tahun 2011 - 2016, yaitu

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, cerdas dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta mewujudkan pelayanan publik terbaik di Propinsi Riau Tahun 2016”,***

Sesuai dengan Visi Kabupaten Siak, Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah :

***“Terwujudnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak yang tangguh dan handal melalui pengembangan Kawasan Industri dan Industri berbasis agro, Perdagangan yang maju, Koperasi dan UKM yang mandiri dalam rangka mencapai masyarakat Kabupaten Siak yang sejahtera Tahun 2016”***

Maka dengan visi tersebut peran Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan merupakan bagian yang sangat penting dan strategis di Kabupaten Siak terutama dalam rangka menciptakan kelembagaan Koperasi dan UKM yang madani, Perdagangan yang maju serta mampu memberikan pelayanan Pasar.

#### b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri darii :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perindustrian, yang terdiri dari :
  - a. Seksi Industri, Agro dan Kimia
  - b. Seksi Industri Logam, mesin, elektronik, aneka & kerajinan
  - c. Seksi Fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana industri
4. Bidang Perdagangan, yang terdiri dari :
  - a. Seksi Fasilitas perdagangan dalam negeri Dan Perdagangan luar negeri
  - b. Seksi Pemantauan dan distribusi

- c. Seksi Pengembangan pasar produk unggulan daerah
- 5. Bidang Pembinaan dan Perlindungan yang terdiri dari :
  - a. Seksi Pengawasan Metrologian
  - b. Seksi Pengawasan barang beredar dan jasa
  - c. Seksi Pengawasan usaha dan Perlindungan Konsumen
- 6. Bidang Koperasi yang terdiri dari
  - a. Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum
  - b. Seksi Pembiayaan pemberdayaan dan usaha
  - c. Seksi Penyuluhan dan pengembangan SDM
- 7. Bidang Usaha mikro, kecil dan menengah, yang terdiri dari :
  - a. Seksi usaha mikro
  - b. Seksi usaha kecil dan menengah
  - c. Seksi sumber daya manusia jaringan usaha dan permodalan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN LAKIP 2016

---

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratis, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Untuk itu pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju good governance yakni kepemimpinan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Esensi dari sistem LAKIP adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya ( program dan kegiatan ) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem LAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan. Capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada stakeholders dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Inpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintahan untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas



kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan.

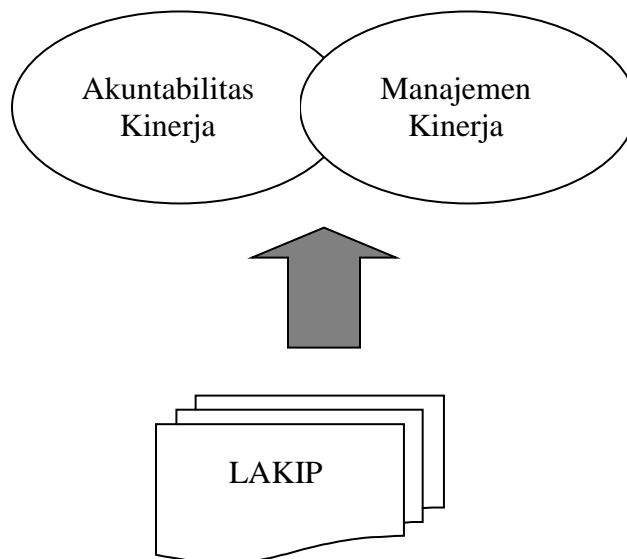
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan ( LAKIP ) memiliki dua fungsi utama sekaligus.

Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.

Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap Instansi Pemerintahan.

Gambar I.1.  
Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP 2016



Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP mencakup hal-hal berikut ;

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2016 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2016. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2016.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2016 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dapat di tingkatkan secara berkelanjutan.

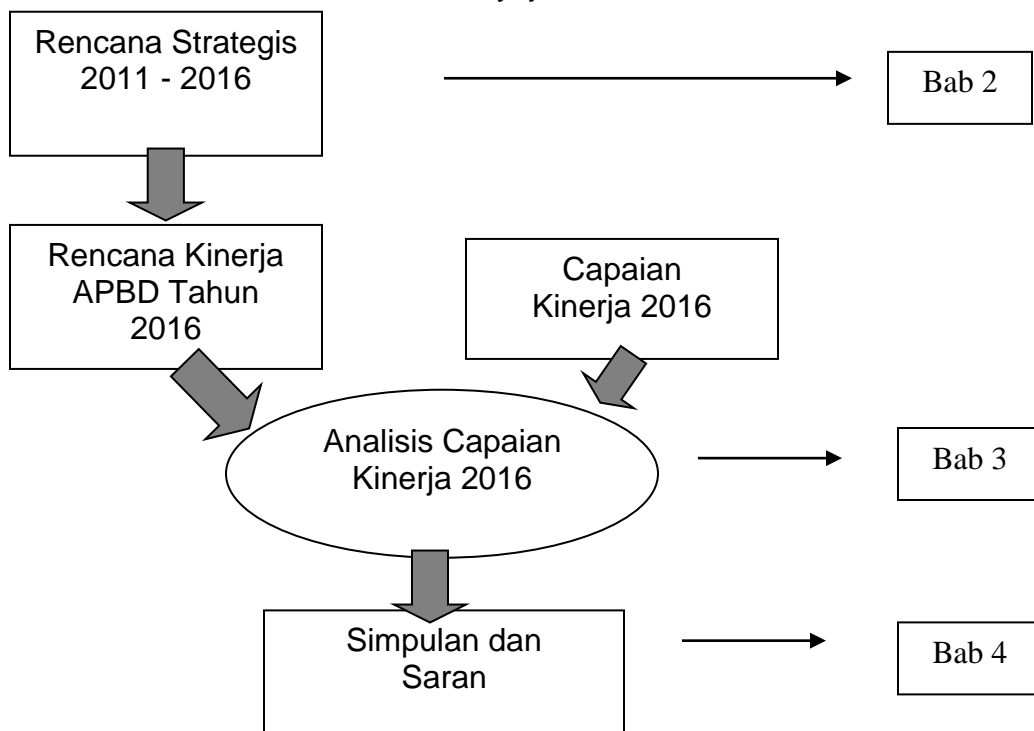
### 3. SISTEMATIKA LAKIP 2016

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi, sementara dari sudut pembiayaan. Capaian kinerja individual perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indicator input, out put, dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja selama tahun 2016. Capaian kinerja ( performance result ) 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja ( performance plan ) 2016 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja ( performance gap ) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016 dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini :

Gambar I.2.  
Sistematika Penyajian LAKIP Tahun 2016



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

- Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas profil Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP 2016
- Bab II – Rencana Strategis menjelaskan rencana strategis untuk periode 2011 – 2016 dan rencana kinerja untuk tahun 2016
- Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban public terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2016
- Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2016 ini dan menguraikan hal-hal yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang

# 2

## RENCANA DAN PENETAPAN KINERJA

### 1. RENCANA STRATEGIS

---

Sebagai sebuah instansi sektor publik. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah mengupayakan penyusunan Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2011-2016 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan seharusnya diformalkan dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Siak. Penyusunannya yang melibatkan seluruh komponen dalam pemerintahan Kabupaten Siak, telah menempatkan Renstra sebagai komitmen bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan seluruh unit kerjanya untuk mewujudkan kinerja aparatur pemerintah dan kelembagaan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan yang akomodatif terhadap tuntunan masyarakat atas pelayanan yang cepat, mudah transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

#### **Visi dan Misi**

##### a. Visi

Visi Merupakan pandangan jauh kedepan kemana dan bagaimana instansi pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipasif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh

instansi pemerintah. Dengan mengacu pada batasan tersebut Visi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dijabarkan sebagai berikut :

***“ Terwujudnya Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak yang Tangguh dan handal melalui pengembangan industri berbasis agro, perdagangan yang maju, koperasi dan UMKM yang mandiri yang berbudaya dalam mencapai masyarakat Kabupaten Siak yang sejahtera tahun 2016”.***

b. Misi

Maka untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan Misi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak Sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Pembina, Pelaku usaha, Manajerial serta Kelembagaan Industri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM..
2. Meningkatkan sarana dan prasarana, kemampuan teknologi, perluasan akses pasar, peningkatan mutu dan daya saing produk, pengembangan industri unggulan berbasis agro, kompetensi daerah dengan memperkuat keterkaitan hulu hilir antara industri inti, industri penunjang dan industri terkait.
3. Mengembangkan jaringan informasi perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM
4. Meningkatkan pelayanan pasar yang berbudaya dan ketersediaan bahan pokok masyarakat yang terjangkau, perlindungan konsumen yang optimal serta menciptakan iklim usaha yang kondusif
5. Meningkatkan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan ( stake holder ) dalam sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi penyaluran permodalan.

Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis

terhadap perkembangan lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program yang realitis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan / kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat, maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Rencana Strategis bersama pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses Rencana Strategis organisasi untuk mencapai misi dan merealisasikan visi.

Adapun tujuan dan sasaran strategis tahun 2016 yang akan dicapai oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut :

Misi Pertama	Mewujudkan Koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri dan professional
Tujuan	Meningkatkan produktifitas Koperasi dan UKM
Sasaran	1. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Koperasi 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Misi Kedua	Pengendalian dan pengawasan serta monitoring

	perdagangan terhadap distribusi barang dan jasa agar berjalan dengan baik.
Tujuan	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan arus masuk barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa akan menjadi stabil dan terkendali.
Sasaran	Lancarnya distribusi barang dan stabilnya harga barang dan jasa.
Misi Ketiga	Meningkatnya sarana dan prasarana, kemampuan teknologi, peningkatan produktivitas mutu dan daya saing produk, kompetensi inti daerah dan terwujudnya pengembangan industri unggulan berbasis agro.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya sarana dan prasarana pengembangan industri</li> <li>2. Meningkatnya kemampuan teknologi</li> <li>3. Meningkatnya produktivitas mutu dan daya saing produk</li> <li>4. Meningkatnya kompetensi inti daerah</li> <li>5. Meningkatnya pengembangan industri unggulan berbasis agro</li> </ol>
Sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkembangnya industri unggulan berbasis agro dan kompetensi Meningkatnya penyebaran informasi di masyarakat disektor industri dan perdagangan serta penataan strukur industri.</li> <li>2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi kerakyatan</li> <li>3. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah</li> </ol>



## **STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi yang akan dilakukan setiap tahunnya.

## 2. RENCANA KINERJA TAHUN 2016

---

Rencana Kinerja Tahun 2016 menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak dapat meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

### 1. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah mengidentifikasi sasaran strategis yang ingin dicapai di tahun 2016. Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

### 2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir : Rencana Strategis diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2016 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. sesuai PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006

### 3. Penetapan Kegiatan.

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan.

#### 4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2016 secara lebih detail dapat dilihat pada Lampiran Formulir Rencana Kinerja Tahunan (Formulir : RKT)

Dalam kurun waktu tahun 2016, program dan kegiatan yang direncanakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapai sasarannya adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Peningkatan Kualitas SDM dan administrasi	Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	43 Pegawai	<b>Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.632.194.700,00</b>
			Penyediaan Jasa Menyurat	5.050.000,00
			Penyediaan Jasa komunikasi ; Sumber daya air dan Listrik	50.500.000,00
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional	283.100.000,00
			Penyediaan Alat tulis Kantor	146.404.700,00
			Penyediaan barang cetakan dan Penggadaan	105.000.000,00
			Penyediaan bahan Bacaan Peraturan Perundangan-Undangan	14.400.000,00
			Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah	643.260.000,00
			Penyediaan Jasa Adminitrasi Kantor	260.400.000,00
			Kunjungan kerja,pertemuan dan peninjauan lapangan dalam daerah	124.080.000,00

			<b>Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>28.850.000,00</b>
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	28.850.000,00
			<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</b>	<b>525.245.000,00</b>
			Promosi komoditi unggulan daerah	248.335.000,00
			Fasilitasi pengembangan usaha industri kecil dan menengah	276.910.000,00
Meningkatnya kualitas koperasi	Jumlah koperasi aktif	212 Koperasi	<b>Program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</b>	<b>430.256.503,00</b>
			Pembinaan, pengawasan dan Penghargaan koperasi berprestasi	430.256.503,00
Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha	Jumlah temuan kasus yang dapat merugikan konsumen	0 – 5 Per Objek	<b>Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan</b>	<b>154.570.000,00</b>
			Pengawasan UTTP ( SPBU, APMS, PKS dan Masyarakat)	154.570.000,00
	Rata-rata koefisien variasi harga kebutuhan pokok utama	2,5-7 %	<b>Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri</b>	<b>198.210.000,00</b>
			monitoring fluktuasi harga Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kab. Siak dan Operasional Pasar	163.540.000,00
			Pengawasan Pendistribusian Paket Kebutuhan Pokok	34.670.000,00

			Masyarakat Bersubsidi	
<b>Meningkatnya kualitas industri kecil menengah (IKM)</b>	Jumlah IKM	994 IKM	<b>Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah</b>	<b>161.070.000,00</b>
			Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industry	161.070.000,00
			<b>Program Penataan Struktur Industri</b>	<b>275.020.000,00</b>
			Penyusunan rencana pengembangan industry daerah	275.020.000,00
<b>Total dana keseluruhan</b>				<b>3.405.416.203,00</b>

Untuk pelaksanaan dan pencapaian target atas **4 sasaran strategis** sebagaimana tersebut di atas, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak pada tahun 2016 telah menetapkan **8 program** dan **18 Kegiatan** dengan total anggaran murni sebesar **Rp. 3.405.416.203,00** ( *Tiga miliar empat ratus lima juta empat ratus enam belas ribu dua ratus tiga rupiah* )

# 3

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 1. PENGUKURAN KINERJA

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visinya. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja diukur dengan menggunakan asumsi sebagaimana digolongkan dalam tabel di bawah ini :

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian
1	≥ 85%	Sangat Baik
2	70% sampai dengan < 85%	Baik
3	55% sampai dengan < 70%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

**Tabel 1.1. Pengukuran Kinerja Diskopperindag Kabupaten Siak Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Targ et	Realisa si	% Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Kualitas SDM dan administrasi	Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Pegawa i	43	43	100%

Meningkatnya kualitas koperasi	Jumlah koperasi aktif	Kop	212	163	77%
Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha	Jumlah temuan kasus yang dapat merugikan konsumen	Temuan	0 - 5	4	80%
	Rata-rata koefisien variasi bahan pokok utama	%	2,5-7	3	75%
Meningkatnya kualitas industri kecil menengah (IKM)	Jumlah IKM	IKM	994	1047	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Diskopperindag Kabupaten Siak tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan indikator dan target kinerja sasaran strategis termasuk kategori capaian “ sangat baik ” artinya capaian kinerja diatas 86%.

## 2. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Analisis pencapaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Analisis ini dilakukan atas pencapaian sasaran yang dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan, antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu indikator kinerja Input, Output, Outcome antara yang direncanakan (diharapkan) dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah yang di capai. Kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan. Dalam tahun 2016, telah ditetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang dicapai melalui pelaksanaan 8 (Delapan) program dan 18 ( Delapan belas ) kegiatan. Semua kegiatan merupakan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan Lakip tahun 2016. Indikator kinerja sasaran beserta target, realisasi dan capaiannya diuraikan dalam tabel berikut ini :

<b>SASARAN 1</b>		<i>Peningkatan Kualitas SDM dan Administrasi</i>			
<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>% Capaian Kinerja</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<i>Peningkatan Kualitas SDM dan Administrasi</i>	Meningkatnya kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran	Orang	43	43	100



Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja indikator sasaran mencapai 100 % termasuk kategori capaian “sangat baik”. Pencapaiannya didukung melalui **Kegiatan Penyediaan surat menyurat, Penyediaa ATK, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan, rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah.**

- Kegiatan Jasa Surat Menyurat terkoordinasi dengan baik.
- Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor tersedia dan terpenuhinya kebutuhan skpd
- Terpenuhinya Bahan bacaan berupa Koran
- Terlaksananya koordinasi dan konsultasi perjalanan dinas

<b>SASARAN 2</b>		<i>Meningkatnya kualitas koperasi</i>			
Meningkatnya kualitas koperasi	Jumlah koperasi aktif	Kop	212	163	77%

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja indikator sasaran mencapai 77 % termasuk kategori capaian “baik”. Pencapaiannya didukung melalui kegiatan ***Pembinaan pengawasan, penghargaan koperasi berprestasi***

- Memotivasi pengurus dan pemangku kepentingan dalam gerakkan koperasi untuk menjalankan usaha koperasi lebih giat dan menjadikan kelembagaan koperasi yang sehat dan berkualitas terdiri dari : 93 Koperasi yang mengikuti RAT mendapatkan penilaian dalam rangka HUT Koperasi ke 69 dengan rangkaian kegiatan diantaranya ; pemberian penghargaan camat peduli koperasi, pemberian penghargaan kepala desa peduli koperasi dan pemberian penghargaan kepada gerakkan koperasi berupa pelaksanaan RAT tercepat, SHU terbesar, Omset terbesar dan Koperasi berprestasi tingkat Kabupaten Siak.

- Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Siak per Desember 2016 yang tersebar 14 kecamatan sebanyak 250 koperasi yang terdiri dari koperasi :
  - a. aktif : 163 koperasi
  - b. tidak aktif : 87 koperasi
 pendataan ini dilaksanakan oleh Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan ( PPKL) dimana setiap kecamatan terdapat 1 orang PPKL. Dalam melakukan pendampingan terhadap koperasi, PPKL tetap melakukan koordinasi dan dalam pengawasan bidang koperasi pada Dinas Koperasi Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Siak.

<b>SASARAN 3</b>	<i>Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha</i>				
------------------	---	--	--	--	--

Terwujudnya sistem distribusi kelancaran arus barang dan jasa, kepastian usaha	Rata-rata koefisien variasi bahan pokok utama	%	2,5-7	3	100
	Jumlah tindak lanjut hasil pelanggaran	UTTP/ kasus	5	165	330

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja indikator sasaran mencapai 100 % termasuk kategori capaian “sangat baik”. Pencapaiannya didukung melalui kegiatan ***Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat, Monitoring Fluktuasi Harga Kepokmas di Kabupaten Siak, Pengawasan UTTP ( SPBU, PKS dan Masyarakat).***

- Dengan capaian keberhasilan berdasarkan pelaksanaan kegiatan tahun 2016 maka realisasi temuan kasus kegiatan mengalami penurunan dari target yang direncanakan hal ini dapat menjelaskan bahwa telah terjadi penurunan peredaran barang yang tidak memenuhi peraturan atau ketentuan yang berlaku yang diperdagangkan oleh para pengusaha, permasalahan yang dihadapi selalu terdapat peredaran barang yang memenuhi ketentuan ditoko

dan lain-lain di wilayah Kabupaten Siak. Solusinya melakukan kegiatan pengawasan barang dan jasa yang melibatkan lintas sektoral/instansi, mengusulkan peralatan, kelembagaan dan jumlah personil yang akan mengikuti diklat teknis. Manfaat bagi masyarakat melindungi konsumen ( masyarakat) terhadap konsumsi barang yang memenuhi standart, keselamatan , kesehatan dan lingkungan – pengawasan penerapan standard nasional Indonesia (SNI) – menciptakan iklim usaha yang sehat dalam negeri.

- Pengawasan UTTP terdiri dari SPBU: PKS: APMS: Pada tahun 2016 ini telah dilakukan tera ulang terhadap alat ukur untuk menindak pelanggaran UU No. 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal, yang mana ditemukan sejumlah 5 (lima) kasus. Pada SPBU KM.9 dan APMS teluk Mesjid dan APMS Bandar Sungai terdapat kasus putusnya kawat segel pada pompa ukur solar dan premium di kec. Mempura dan Sei Apit. Sedangkan di Kecamatan Siak terdapat pelanggaran yang dilakukan APMS dengan tidak melaporkan alat ukur sehingga tidak tera. Untuk menindak lanjuti hal ini dilakukan tera ulang dan peringatan keras terhadap APMS yang telah melakukan pelanggaran. Hambatan atau kendala dalam melakukan pengawasan dan tera ulang yang sering terjadi dilapangan disebabkan masih minimnya sarana peralatan kemetrologian seperti alat ukur standar sehingga diperlukan penambahan alat ukur berupa bejana 20 liter, timbangan bobot insut kapasitas 50 kg, anak timbang satu set kelas M. Langkah antisipatif dalam peningkatan kinerja pengawasan adalah dengan melakukan pengadaan sarana kemetrologian yakni alat ukur standar untuk pengawasan UTTP.

Dengan capaian/keberhasilan pengawasan UTTP, terukurnya UTTP yang akurat dengan standar. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan, minimnya pengetahuan masyarakat pengguna UTTP tentang kewajiban tera/tera ulang setiap tahun. Langkah-langkah peningkatan kinerja tahun berikutnya adalah dengan melakukan peningkatan pengawasan UTTP terhadap pelaku usaha dan masyarakat serta dengan mensosialisasikan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal dan PP No.2 Tahun 1985 tentang wajib tera dan tera ulang.

- Dengan capaian/keberhasilan pendistribusian paket kebutuhan pokok masyarakat untuk Rumah Tangga Tepat Sasaran (RTS) telah didistribusikan 100% keseluruhan dari 131 Desa/Kelurahan dengan jumlah paket 17.300, pendistribusian telah dilaksanakan dengan 2 tahap. Kendala yang dihadapi; data RTS yang dikeluarkan oleh TNP2K tidak sinkron data masyarakat Ris yang ada di 131 Desa / Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Siak sedangkan untuk solusinya; Pemuktahiran data RTS yang dikeluarkan oleh TNP2K yang sedang dilaksanakan oleh Sekretariat TKPK di Kabupaten Siak.
- Dengan capaian/keberhasilan Monitoring yang dilakukan setiap minggu di 14 Kecamatan oleh petugas pencatatan harga yang telah ditujuk masing-masing

kecamatan. Hasil dari pencatatan direkap ditingkat kabupaten dapat dilihat terjadinya penurunan maupun kenaikan harga kepokmas perbedaan harga sekitar 2,5 –7 % terjadi pada bulan-bulan tertentu, terutama pada bulan-bulan hari besar agama seperti puasa, hari raya maupun natal. Kendala yang dihadapi; kenaikan harga yang terjadi sulit untuk dibendung karena komoditi banyak yang didatangkan dari luar Kabupaten Siak untuk mengatasi dan membantu masyarakat ketika terjadi kenaikan harga maka pelaksanaan pasar murah dilaksanakan pada saat – saat menjelang hari besar agama.

<b>SASARAN 4</b>		<i>Meningkatnya sumber daya aparatur pembina dan pelaku usaha industri</i>			
Meningkatnya kualitas industri kecil dan menengah (IKM)	Jumlah IKM	IKM	994	1047	100

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja indikator sasaran mencapai 100 % termasuk kategori capaian “sangat baik”. Pencapaiannya didukung melalui **kegiatan Penyusunan Rencana Pengembangan Industri Daerah**

- Dasar kegiatan menurut Undang Undang nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Nasional 2015-2035. Maksud dan tujuan kegiatan adanya pedoman dalam perencanaan pembangunan industri di Kabupaten Siak Tahun 2016-2035, untuk mensinkronkan program perencanaan pembangun industri antara kabupaten, propinsi dan nasional, dan memaksimalkan potensi sumber daya daerah dalam pembangunan dan pengembangan industri.
- Manfaat : tersedianya dokumen perencanaan pembangunan industri Kabupaten Siak sebagai pedoman bagi seluruh stakeholder untuk periode Tahun 2016-2035.

### 3. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

---

Pencapaian sasaran yang telah ditargetkan tahun 2016 tidak terlepas dari adanya dukungan dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran tahun 2016 ditetapkan dengan jumlah total Rp. 8.223.540.645,- Anggaran yang digunakan untuk Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung masing-masing sebesar Rp. 4.818.124.442,- dan 3.405.416.203,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.2  
Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung

No	Rincian	Anggaran ( Rp. )	%
1.	Belanja Tidak langsung	4.818.124.442,-	83,32
2.	Belanja Langsung	3.405.416.203,-	78,09
	Total ( surplus/(Defisit)	8.223.540.645,-	81,15

# 4

## Penutup

Sebagai bagian penutup dari LAKIP tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran startegisnya. Indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan apakah ke 4 ( empat ) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016 telah dapat dicapai namun belum dapat direalisasikan 100%. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.

Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100% telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2016, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Siak mempertimbangkan agar dapat mendanai kegiatan yang mendukung Sasaran lainnya yang belum dapat terlaksana tahun 2016.
2. Perlunya dukungan Stake Holders terhadap indikator Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Perlu adanya antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul pada tahun 2016.
4. Peningkatan Pengendalian dan pengawasan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengharapkan agar LAKIP tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para Stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Sebagai bagian penutup dari LAKIP tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran startegisnya. Indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan apakah ke 4 ( Empat ) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016 telah dapat dicapai namun belum dapat direalisasikan 100%. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan,

Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai 100% telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2016, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Siak mempertimbangkan agar dapat mendanai kegiatan yang mendukung Sasaran lainnya yang belum dapat terlaksana tahun 2016.
2. Perlunya dukungan Stake Holders terhadap indikator Kinerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
3. Perlu adanya antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul pada tahun 2016.
4. Peningkatan Pengendalian dan pengawasan Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Siak

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap aparat Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mengharapkan agar LAKIP tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para Stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.